

KOMUNIKASI POLITIK TOKOH MASYARAKAT PADA PARTAI ISLAM DALAM MENYIKAPI PILKADA 2024 DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

Moch. Farhan

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia

farhan190888@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan. Pasca amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden disepakati pemilihan langsung oleh rakyat dan dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pilkada juga dimasukkan pada pemilu. Istilah pemilu lebih sering merujuk pada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Asas musyawarah juga termaktub dalam QS. al-Syu'ara: ayat 38 yang dijadikan rujukan oleh lembaga negara yang diimplementasikan dalam pemilu. Ketika pemilu PPWP, DPR RI, DPRD, masuk pada kehidupan masyarakat patron klien tokoh masyarakat di pedesaan menjadi sebuah keniscayaan. Salah satunya di desa Gunungsari. Perhatian peneliti terhadap peran tokoh agama dalam memenangkan calon kepala daerah menjadikan penelitian ini menarik untuk didalami dengan judul penelitian Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai Islam Dalam Menyikapi Pilkada 2024 Di Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai Islam Dalam Menyikapi Pilkada 2024 di Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ? 2) Apa faktor pendukung Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai Islam dalam Menyikapi PPilkada 2024 di Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ? 3) Apa faktor penghambat Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai Islam dalam Menyikapi Pilkada 2024 di Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?

Metode Pengumpulan Data. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisa Data. Setelah data terkumpul dianalisis dengan reduksi data, display data dan verifikasi data, kemudian untuk mendapatkan data yang absah peneliti melanjutkan dengan menggunakan triangulasi data dan triangulasi sumber.

Hasil dan Diskusi. tokoh masyarakat di desa Gunungsari dalam mengomunikasikan PPP dan PKB, menempuhnya dengan memberikan informasi kepada masyarakat umum, memperkenalkan visi-misi serta dari figur yang didukungnya dari PPP dan PKB, dan mengajak masyarakat untuk memilih calon yang diusungnya.

Simpulan. Faktor pendukung dalam komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai Islam Dalam Menyikapi Pilkada 2024 Di Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember adalah adanya kesamaan bahasa, kultur budaya dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya pilihan yang telah ditentukan oleh masyarakat serta adanya sikap fanatik di tengah masyarakat sehingga tokoh masyarakat lebih memilih untuk tidak mengajak memilih kepada masyarakat supaya terhindar dari perselisihan.

ABSTRACT

Introduction. Following the fourth amendment to the 1945 Constitution in 2002, the presidential and vice-presidential elections were agreed to be directly elected by the people and included in the general election process. Law Number 22 of 2007 also included regional elections as part of the general election. The term "election" more often refers to legislative and presidential elections, which are held every five years. The principle of deliberation is also enshrined in Surah al-Syu'ara, verse 38, which is used as a reference by state institutions and implemented in elections. When elections for the PPWP (WP), the Indonesian House of Representatives (DPR RI), and the Regional People's Representative Council (DPRD), entering into the lives of rural communities, patron-client relationships with community leaders became a necessity. One example is in Gunungsari Village. The researcher's attention to the role of religious leaders in winning regional head candidates makes this research interesting to explore, entitled "Political Communication of Community Leaders in Islamic Parties in Responding to the 2024 Regional Elections in Gunungsari Village, Umbulsari District, Jember Regency." The focus of this research is: 1) How does political communication among community leaders within Islamic parties respond to the 2024 regional elections in Gunungsari Village, Umbulsari District, Jember Regency? 2) What are the supporting factors in political communication among community leaders within Islamic parties responding to the 2024 regional elections in Gunungsari Village, Umbulsari District, Jember Regency? 3) What are the inhibiting factors in political communication among community leaders within Islamic parties responding to the 2024 regional elections in Gunungsari Village, Umbulsari District, Jember Regency?.

Method of collecting data. This research method uses a descriptive qualitative approach with data collection through observation, interviews, and documentation.

Data analysis. After the data was collected, it was analyzed through data reduction, data display, and data verification. To obtain valid data, the researcher continued by using data triangulation and source triangulation.

Result and Discussion. The community leaders in Gunungsari village communicate about the PPP and PKB by providing information to the public, introducing their visions and missions and supporting figures from PPP and PKB, and inviting the public to vote for their candidates.

Conclusion. Supporting factors in the political communication of community leaders in Islamic parties in response to the 2024 regional elections in Gunungsari Village, Umbulsari District, Jember Regency include shared

language, cultural traditions, and emotional closeness with the community. Meanwhile, inhibiting factors include the existence of predetermined choices and fanaticism within the community, which leads community leaders to prefer not to invite the public to vote to avoid conflict.

Pendahuluan

Pesta demokrasi Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota wakil dewan di parlemen yang kemudian kita kenal dengan pemilu. Pemilu dikatakan sebagai sebuah proses pengisian jabatan politik tertentu di kursi kepemimpinan. Jabatan itu beragam mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat, kepala daerah yang dikenal dengan sebutan dewan perwakilan rakyat atau DPR. DPR juga bervariasi seperti DPRD RI, DPRD Provinsi, atau DPRD wilayah (dapil). dan selanjutnya akan dilangsungkan pula pemilu kada (pemilihan umum kepala daerah)

Dengan bahasa lain dinyatakan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.¹

Amanat UU NO 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah pada Bab I pasal (1) ayat (1) menyatakan bahwa “pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara adil, jujur, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”²

Begitu pula Islam, dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya sebatas mengatur hubungannya dengan Allah Swt (ibadah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini.

¹ Haricahyono Cheppy, *Ilmu Politik Dan Praktiknya* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), 59.

² UU No. 7 Tahun 2017.

Bila nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan bagi manusia diabaikan, maka sungguh akan terjadi berbagai bentuk diskriminasi, penindasan dan kezaliman. Berkaitan dengan hal itu, maka Islam mengatur dan menetapkan bahwa harus ada pemimpin yang akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara.

Terkait dengan persoalan ini, tentu harus ada pula lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan, perda atau qanun, di samping lembaga yang secara khusus menegakkan supremasi hukum. Ketiga otoritas tersebut dalam istilah teori kenegaraan modern (*saparation of power*), terdiri dari pihak atau lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sekalipun, betapa pentingnya sebuah pemerintahan (negara) dalam mengatur dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya, tetapi Islam tidak pernah memberikan suatu model atau bentuk dari suatu Negara tertentu. Karena itu munculnya perbedaan di kalangan para ahli hukum dan pakar politik, dan hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Baik Al-Qur'an maupun al-Sunnah, yang keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam, nampaknya tidak memberi petunjuk yang tegas tentang hal itu,³ namun terdapat dasar-dasar yang fundamental dalam pembentukan sebuah tatanan negara dengan sistem yang dianut sesuai dengan sosiokultural masyarakatnya.

Salah satunya adalah sistem pemilihan umum yang dapat dilaksanakan setiap lima tahun sekali serta semua rakyat di Indonesia tersentuh dan menjadi konsituen dalam pemilihan umum merupakan bentukan dari pemerintah melalui undang-undang. Taat terhadap pemerintah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu, sebagaimana al-Qur'an menyatakan :

يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم : الآية

Artinya : *hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul (Muhammad saw), dan taatilah ulil amri (pemegang kuasa) di antara kamu (Q.S An-Nisa' : 59)*⁴

Disisi lain ketika kita melihat atau juga merasakan bagaimana pemilu ditetapkan dan diterapkan, seakan kita terbawa pada sebuah pandangan bahwa dalam system pemilihan, merupakan bentuk musyawarah secara global. Al-Qur'an memberikan beberapa landasan yang prinsipil terkait dengan pemilu, antara lain asas musyawarah dalam hubungan dengan proses pemilihan pemimpin, menuntut pertanggungjawaban dan pemberhentiannya. Hal ini seperti dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut :

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

Artinya : *Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah*

³ Hamzah Ya'qub, Publisistik Islam (Bandung : Cv. Diponegoro, 2000), 76.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Bandung : Jabal Raudhah, 2010), 87.

*antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. al-Syu'ara: 38).*⁵

Atas dasar itu mengharuskan setiap pemimpin (penguasa), yang mendapat kepercayaan dari rakyat, untuk menggunakan asas musyawarah dalam setiap tugasnya dan pengambilan keputusan berhubungan dengan kepentingan rakyat. Kewajiban pemerintah untuk selalu memperhatikan kemaslahatan ini berkaitan erat dengan ajaran Islam tentang hubungan pemerintah dan rakyatnya seperti dikatakan oleh Imam al-Syafi'i bahwa kedudukan pemerintah dalam hubungannya dengan rakyatnya adalah seperti kedudukan wali dalam hubungan dengan anak yatim.

Kaitannya dengan komunikasi, pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobbi, dan lain sebagainya. Dalam pemilu, pemilih yang disebut *konstituen* menjadi objek kampanye dengan beragam program dan janji-janji politik, agar supaya para konstituen dapat memilih mereka yang tengah berkompetisi pada pesta demokrasi atau hari raya kerakyatan.

Ketika sistem pemilihan wakil rakyat (DPR RI, DPRD PUSAT, DPR provinsi, DPR Daerah, DPR Wilayah Kota Dan Semacamnya) menyentuh segala penjuru Nusantara tak jarang patron klien seorang tokoh masyarakat di pedesaan turut andil dalam suksesi pemilu. Termasuk di daerah desa Gunungsari kecamatan Umbulsari kabupaten Jember.

Para tokoh masyarakat ikut serta dalam mengkomunikasikan visi-misi partai Islam kepada masyarakat, guna mencapai sebuah tujuan menangnya partai yang menjadi pilihannya. Masyarakat desa Gunugsasri menjadikan tokoh masyarakat sebagai tolak ukur dalam memilih sebuah partai. Terumata partai Islam yang menyentuh kehidupan masyarakat desa Gunungsari yang di antaranya adalah PKB, PPP.⁶

Untuk mengkomunikasikan serta mencitrakan partai Islam di desa Gunungsari, tokoh masyarakat terlibat langsung dalam agenda-agenda tertentu agar dapat mempengaruhi masyarakat meskipun dalam kontes tidak ada unsur pemaksaan dan para masyarakat tidak merasa terbebani atas kehadiran parpol Islam. Realitas secaman ini tentunya tidak lepas dari bagaimana komunikasi politik yang dilakukan para tokoh masyarakat yang berlangsung dalam kehidupan sosial bermasyarakat di desa Gunungsari. Guna mengkaji realitas ini peneliti berupaya untuk mengkajinya sedemikian rupa dengan mengangkat judul penelitian Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Pada Partai Islam Dalam Menyikapi Pilkada tahun 2024 Di Desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah (Bandung : Jabal Raudhah, 2010), 488

⁶ Observasi, Gunungsari 20 November 2018

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian dibidang ilmu-ilmu sosial kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, menganalisis dan mentafsir fenomena, fakta-fakta dan perilaku masyarakat, seperti sikap keagamaan, kecerdasan, pengaruh kebudayaan dan sejenisnya guna menemukan makna, prinsip, pengetahuan dan metode-metode baru.⁷

Data yang digunakan disesuaikan dengan teori yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian kualitatif berusaha menemukan teori baik yang bersifat substansif atau formal, yang semuanya berasal dari data.⁸

Sedangkan deskriptif adalah suatu bentuk penelitian, yang bertujuan mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia.⁹ Deskripsi ini merupakan realitas ilmiah berdasarkan kenyataan hidup yang ada pada masyarakat sebagai objek atau subjek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.¹⁰ Analisis deskriptif dilakukan dengan cara memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.¹¹ Adapun langkah-langkah analisis data menurut Milles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Maksudnya yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian sampai pada pembuatan laporan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

⁷ Hefni Zain, *Power Point: Materi diberikan pada Mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif* pada Semester Ganjil (Semester 5) tahun Akademik 2011/2012 di STAIN Jember.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 133.

⁹ Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 72.

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 126.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 353.

3. *Conclusion Drawing /Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)*

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.¹²

Hasil dan Pembahasan

Setelah peneliti menelusuri lebih mendalam di lokasi penelitian, peneliti hanya menemukan dua partai yang dapat dikatakan aktif berkampanye di desa Gunungsari. Di antara kedua partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan temuan ini peneliti hanya akan mendeskripsikan pola komunikasi politik tokoh masyarakat pada partai Islam berupa PKB dan PPP dalam menyikapi Pilkada 2024. Dalam hal penyajian data, peneliti mendeskripsikannya sebagai berikut.

1. **Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Desa Gunungsari**

Berdasarkan kajian data selama berada di lokasi penelitian, peneliti menemukan pola komunikasi tokoh masyarakat di desa Gunungsari bahwa komunikasi politik tokoh masyarakat pada partai Islam dalam menyikapi Pilkada 2024 terbagi ke dalam tiga kategori komunikasi, yaitu komunikasi politik yang sebatas memberikan informasi, komunikasi politik yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi dan komunikasi persuasif. Sebagaimana deskripsi berikut ini :

a. **Komunikasi politik Sebatas Informasi**

Dalam setiap aktivitas komunikasi melalui transmisi pesan yang dilakukan oleh para pelaku komunikasi tentunya mengandung informasi berupa makna pesan yang disampaikan komunikator yang diterima oleh komunikan. Sebagaimana ustazd Marzuki¹³ menyatakan “*Guleh sering madepak ka masyarakat jek mun oreng tak berpolitik e masa semangken nikah gampang ecokocoh*” (saya sudah sering menyampaikan kepada masyarakat kalau prang tidak berpolitik di era sekarang gampang ditipu).

Memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat memahami karakter caleg juga perlu dilakukan sebagaimana Nur Ihsan¹⁴ menyatakan “jelasagi kadek calon bupati se dukung PKB nikah deri NU tojjuwennah nyalon nikah napah, pas dek remmah ka rakyat open napah enten, nikah jelassagi” Terlebih dahulu kita jelaskan dahulu bahwa cabup PKB ini dari NU, kemudian jelaskan pula tujuan mencalonkan diri apa, dan juga beri penjelasan terkait bagaimana kepeduliannya terhadap rakyatnya. Informasi tentang cabup/cawabup ini merupakan komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu

¹²Matthew B. Milles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif-Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi* (Jakarta: Universitas Indonesia-Press,2007),16.

¹³ Ustadz Marzuki, wawancara 18 Desember 2019

¹⁴ Nur Ihsan, Wawancara, Gunungsari 20 Januari 2019

pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.¹⁵ Artinya informasi ini merupakan bentuk pengikatan yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat untuk mengarahkan objek atau komunikasi kepada kegiatan tertentu yakni kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara berupa pemilihan kepala daerah di Jember. Dengan capaian nantinya akan memenangkan cabup/cawabub

Misbahul Munir¹⁶ juga menyatakan memberikan informasi kepada para wali santri yang mau dan tidak ada unsur paksaan, sebagaimana pernyataannya “se penting ngajak aberrik oning ka tan tretan kak entowan terutama wali santri, guleh ka keluarga dibik beih tak maksah (yang penting mengajak, memberi tahu kepada saudara-saudara sekitar sini terutama wali santri, saya kepada keluarga saja tidak memaksa apalagi ke orang lain). Hal ini dilakukan oleh Misbahul Munir untuk menjaga stabilitas sosial, dan sebagian besar yang peneliti datangi tokoh masyarakat dalam memberikan informasi tidak memaksakan kehendak guna menjaga stabilitas sosial.

b. Komunikasi politik yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi

Komunikasi politik merupakan upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan. Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas, pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan, nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian, dan kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.¹⁷

Untuk itu, demi mencapainya tokoh masyarakat di Gunungsari berusaha mempengaruhi masyarakat sekitarnya sebagaimana pernyataan Hj. Barirotul umam berikut *Buleh cuma nareh, se kenceng toreh se tak kenceng ghi dekremmah jek ngak gnika endik hak masing-masing* (Saya hanya menawarkan kalau mau mencoblos silahkan dan kalau tidak bersedia mencoblos ya silahkan. Seperti ini kan mereka masyarakat memiliki hak individu masing-masing).¹⁸ Hal senada juga

¹⁵ Ibid, 231.

¹⁶ Misbahul Munir, wawancara , Gunugsari 07 Januari 2019

¹⁷ Dannimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya,1999),.25.

¹⁸ Hj. Barirotul Ummam, wawancara, Gunungsari, 09 Januari 2019

diyatakan oleh Gus Mahrus yang berusaha untuk mempengaruhi salah satu warga dengan pernyataan *“ghi bik guleh epataberin, mun kerenah kenceng nikah pele deri PKB, dibi'en gik mikker pas ajawab jek mun aromasa tak nyaman ka tim se deteng berik*, (Saya menawarinya untuk memilih calon dari PKB, ia memikirkan panjang dan menjawab bahwa ia merasa tidak nyaman atau tidak enak ke tim yang datang kerumahnya kemaren).¹⁹

Begitu pula dengan Nur Ihsan untuk memengaruhi masyarakat ia berupaya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang tentang karakteristik Cabup/cawabup yang ia kawal sebagaimana pernyataannya *“jelasagi kadek calon se dukung PKB nikah deri NU tojjuwennah nyaleg nikah napah, pas dek remmah ka rakyat open napah enten* (Terlebih dahulu kita jelaskan dahulu bahwa caleg PKB ini dari NU, kemudian jelaskan pula tujuan dari caleg ini mencalonkan diri apa, dan juga beri penjelasan terkait bagaimana kepedulian caleg ini terhadap rakyatnya).²⁰

Komunikasi yang berorientasi untuk memengaruhi masyarakat merupakan manifestasi dari bagaimana seorang tokoh masyarakat yang menjadi relawan atau tim kampanye dari partai Islam berupa PKB dan PPP mentransmikan makna pesan sehingga komunikan memiliki pemahaman makna sebagaimana maksud dari komunikator di mana pesan yang disampaikan dapat diikuti.

c. Komunikasi politik yang berupa ajakan

Untuk mensukseskan caleg yang dikawal oleh tokoh masyarakat pada partai Islam, mereka berupaya mengajak masyarakat. Komunikasi politik ini (*political communication*) dalam pandangan Kantaprawira, memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.²¹

Ketika berbicara mengenai intra golongan, institusi atau asosiasi maka dalam hal ini dapat dimengerti bahwa parpol Islam (PKB dan PPP) merupakan bagian dari sebuah kelompok yang terstruktur dan diakui oleh konsitusi, sehingga tokoh masyarakat mengajak masyarakat untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, melalui aktivitas komunikasi yang berusaha mengajak.

¹⁹ Gus Mahrus, wawancara 15 Desember 2018

²⁰ Nur Ihsan, Wawancara, Gunungsari 20 Januari 2019

²¹ Novel, Ali, *Peradaban Komunikasi Politik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1999), 231

Sebagaimana dinyatakan oleh Oleh Rohman²² *Mun ngajek oreng mas,, ghi abes usianah mas*, dan juga pernyataan Misbahul Munir “*ghi caranah ngajek guleh namuy kon oreng, ghii kebetulan guleh etorok santreh,, ghii se e sentareh guleh nikah wali santri, insya Allah gun comah seghemik oreng, anikah se seyentreh guleh, comak guleh tak maksah, ghi kenceng mak mile tak kenceng ghi tak ponapah, gun se penting ngajek aberrik oning ka tan tretan kak entowan terutama wali santri, guleh ka keluarga dibik beih tak maksah, namun jek pon keluarga ghi tak usah ajek pon atorrok dibik, kecuali kelurga se bek jeu, enggak majedik, sapopoh du popoh ben sateruusah nikah perlo esentareh pon* (cara saya mengajak adalah dengan bertamu kepada orang-orang, kebetulan saya kan ada santri, oleh karenanya yang saya datangi wali santri, insya Allah wali santri yang saya datangi sekitar dua puluh lima orang. Namun dalam hal ini saya tidak memaksakan kehendak saya untuk memilih, bagi mereka yang berkenan untuk menerima ajakan saya ya saya persilahkan namun bagi yang tidak berkenan tidak saya paksa yang terpenting saya sudah mengajaknya, saya memberi tahu saudara-saudara sekitar sini terutama wali santri, saya kepada keluarga sendiri saja tidak memaksa, akan tetapi kalau sudah namanya keluarga tanpa diajak pun sudah ikut dengan sendirinya. kecuali keluarga yang agak lumayan jauh, seperti paman, seudara sepupu dan seterusnya ini perlu diajak dan didatangi rumahnya).²³ Dan juga pernyataan Hj. Barirotu ummam “*Mun gun ngajek oreng gemmpang, kan bedeh muslimatan, enggak guleh ketua sholatan di muslimat kak entoh* (kalau saya ngajak orang mudah, kan ada muslimatan sedangkan saya adalah ketuanya).²⁴

Aktivitas mengajak ini dapat dimengerti sebagai upaya untuk memberikan sebuah kehidupan masyarakat yang sadar akan politik, mulai dari menjelaskan visi-misi caleg dan juga memberikan pemahaman terkait dengan karakteristik caleg, ini adalah bentuk aktivitas mengajak yang berusaha meyakinkan masyarakat.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat di desa Gunungsari dalam mengomunikasikan PPP dan PKB, menempuhnya dengan memberikan informasi kepada masyarakat umum, memperkenalkan visi-misi serta dari figur yang didukungnya dari PPP dan PKB, dan mengajak masyarakat untuk memilih calon yang diusungnya.

²² Abdurrohman, wawancara, Gunungsari 12 Januari 2019

²³ Misbahul Munir, wawancara, Gunugsari 07 Januari 2019

²⁴ Hj. Barirotul Ummam, wawancara, Gunungsari, 09 Januari 2019

Daftar Pustaka

- Haricahyono Cheppy, *Ilmu Politik Dan Praktiknya* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999).
- UU No. 7 Tahun 2017.
- Hamzah Ya'qub, *Publisistik Islam* (Bandung : Cv. Diponegoro, 2000).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung : Jabal Raudhah, 2010).
- Hefni Zain, *Power Point: Materi diberikan pada Mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif pada Semester Ganjil (Semester 5) tahun Akademik 2011/2012 di STAIN Jember.*
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005).
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 126.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- Matthew B. Milles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif-Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi* (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2007).
- Dannimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1999).
- Novel, Ali, *Peradaban Komunikasi Politik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1999).